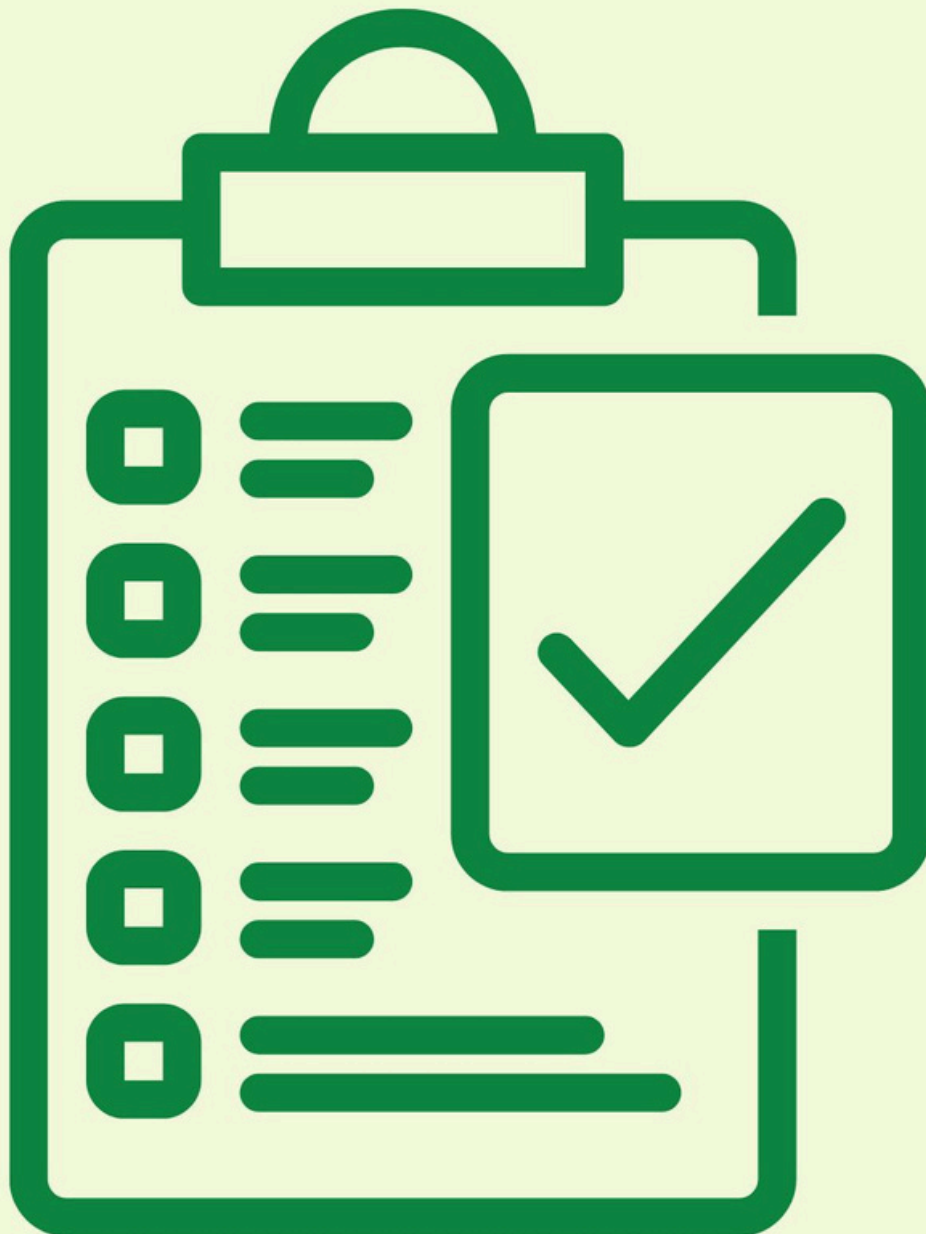


Pedoman Penyusunan Regulasi dan SOP Untuk Satgas PPKPT





#RuangAman Publication Series #2

Pedoman Penyusunan Regulasi dan SOP Untuk Satgas PPKPT

**Khaerul Umam Noer, Ati Kusmawati,
Murniati Agustian**

Publikasi ini merupakan bagian dari penelitian berjudul Analisis Implementasi Permendikbudristek 30/2021 dalam Mendorong Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi: Aspek Kebijakan dan Sosiokultural yang didanai oleh Hibah Katalis Kemendikbudristekdikti Tahun 2024. Dengan nomor SK 0639/E5/PG.02.00/2024 tertanggal 23 Juli, kontrak antara Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat dan LLDIKTI 3 Nomor 058/E5/PG.02.00/PL.BATCH.2/2024 tertanggal 1 Agustus, Kontrak antara LLDIKTI 3 dan UMJ Nomor 1087/LL3/AL.04/2024 tertanggal 8 Agustus, dan Kontrak antara UMJ dan Peneliti Nomor 116/R-UMJ/VIII/2024 tertanggal 12 Agustus.

.Tim mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, LLDIKTI 3, Rektor UMJ, LPPM UMJ, Yayasan Attaqwa, dan Droupadi atas bantuan dan fasilitasnya.

(c) Oktober 2024. BookCode 003/REF.ANAC/2024

ATIQOH NOER ALIE CENTER

Office: Summarecon Tower 7th FL., Summarecon Boulevard, Kota Bekasi
sekretariat@atiqohcenter.id

1 Memahami Konteks dan Kebutuhan Perguruan Tinggi

Langkah pertama adalah memahami konteks dan kebutuhan khusus kampus terkait kekerasan. Mulailah dengan mengidentifikasi jenis-jenis kekerasan yang umum terjadi di lingkungan pendidikan tinggi, seperti kekerasan seksual, bullying, kekerasan emosional, atau kekerasan berbasis gender. Data awal dapat dikumpulkan melalui survei, wawancara, atau focus group discussion (FGD) dengan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Analisis ini membantu tim mengetahui skala masalah, kelompok yang rentan, dan penyebab utama kekerasan.

Selanjutnya, pelajari regulasi nasional dan internasional yang relevan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Peraturan Menteri Pendidikan tentang pencegahan kekerasan, dan pedoman global seperti Konvensi Hak Asasi Manusia. Pastikan bahwa SOP yang akan disusun sesuai dengan aturan ini agar memiliki legitimasi hukum. Jangan ragu untuk melibatkan konsultan hukum atau mitra eksternal jika diperlukan.

Diskusikan hasil analisis ini dengan pihak manajemen perguruan tinggi untuk memastikan dukungan penuh. Presentasikan data secara ringkas dan jelas, termasuk urgensi memiliki SOP untuk menangani kasus kekerasan. Dukungan manajemen sangat penting, terutama dalam menyediakan sumber daya, wewenang, dan komitmen untuk pelaksanaan SOP.

Hasil analisis ini harus didokumentasikan dengan rapi dalam bentuk laporan awal. Laporan ini nantinya menjadi dasar untuk menyusun SOP. Pastikan laporan mencakup identifikasi masalah, referensi hukum, dan tujuan penyusunan SOP agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang arah kerja.



2 Membentuk Tim Penyusun dan Pembagian Tugas

Langkah kedua adalah membentuk tim penyusun SOP dengan keanggotaan yang beragam. Tim ini harus terdiri dari perwakilan mahasiswa, dosen, tenaga administrasi, serta staf layanan konseling atau kesehatan. Keberagaman anggota penting untuk memastikan bahwa perspektif semua kelompok di kampus terwakili. Pastikan setiap anggota memahami tujuan tim dan memiliki komitmen untuk menyelesaikan tugas.

Tetapkan pembagian tugas yang jelas dalam tim. Misalnya, satu kelompok dapat fokus pada pengumpulan data dan kajian regulasi, sementara kelompok lain bertugas merancang alur kerja SOP. Sementara itu, tim lain dapat ditugaskan untuk mengoordinasikan komunikasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Pembagian kerja yang terstruktur memudahkan pengelolaan waktu dan sumber daya.

Adakan pelatihan dasar untuk anggota tim agar mereka memahami isu kekerasan dan prinsip-prinsip penanganan korban. Pelatihan ini dapat mencakup pengenalan tentang kekerasan berbasis gender, pendekatan empati terhadap korban, dan pentingnya menjaga kerahasiaan. Libatkan narasumber eksternal, seperti LSM atau konselor, untuk memberikan panduan praktis kepada tim.

Setelah tim terbentuk, buat jadwal kerja yang realistis, termasuk target waktu untuk setiap tahapan penyusunan SOP. Jadwal ini harus mencakup ruang untuk konsultasi, diskusi, dan revisi dokumen. Dengan jadwal yang terstruktur, tim dapat bekerja lebih efisien dan menghindari penundaan.



3 Merancang Alur Kerja Penanganan Kekerasan

Langkah ketiga adalah merancang alur kerja yang jelas untuk penanganan kekerasan. Alur kerja ini mencakup seluruh proses, mulai dari pelaporan, investigasi, pendampingan korban, hingga penyelesaian kasus. Gunakan pendekatan langkah demi langkah agar SOP mudah diikuti oleh tim yang tidak memiliki latar belakang hukum.

Mulailah dengan mendesain mekanisme pelaporan. Pastikan korban atau saksi memiliki akses mudah untuk melaporkan kasus, seperti melalui hotline, email khusus, atau aplikasi berbasis kampus. Sistem pelaporan harus dirancang untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan pelapor, sehingga mereka merasa aman.

Selanjutnya, rancang prosedur untuk penanganan awal kasus. Ini mencakup langkah-langkah seperti menghubungi korban, menyediakan pendampingan psikologis, dan memastikan keselamatan fisik korban. Untuk ini, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan unit layanan konseling kampus atau lembaga eksternal.

Prosedur investigasi juga harus dirancang secara transparan dan adil. Tim investigasi harus memastikan semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memberikan informasi, tanpa memihak atau menimbulkan tekanan. Sertakan pula prosedur eskalasi jika kasus memerlukan campur tangan pihak eksternal, seperti aparat penegak hukum.



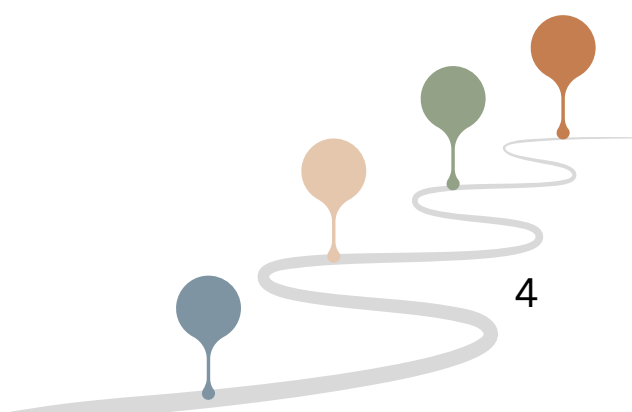
4 Menyusun Prosedur Perlindungan Korban

Perlindungan korban adalah inti dari SOP. Prosedur ini harus dirancang untuk memastikan bahwa korban merasa didukung dan dilindungi selama proses penanganan kasus. Langkah pertama adalah memastikan kerahasiaan identitas korban dalam setiap tahap proses, termasuk dalam dokumentasi kasus.

Tentukan langkah-langkah untuk melindungi korban dari ancaman atau intimidasi, baik oleh pelaku maupun pihak lain. Perguruan tinggi dapat menyediakan pengamanan tambahan, menawarkan tempat tinggal sementara, atau memberikan opsi untuk mengubah jadwal akademik korban jika diperlukan.

Berikan akses ke layanan pendampingan yang memadai, seperti konseling psikologis, bantuan hukum, dan layanan medis. Semua layanan ini harus disediakan secara gratis dan mudah diakses. Jika kampus tidak memiliki sumber daya internal, pertimbangkan untuk bermitra dengan organisasi eksternal yang memiliki keahlian dalam mendukung korban kekerasan.

Masukkan mekanisme pengaduan jika korban merasa tidak puas dengan penanganan yang diterima. Mekanisme ini dapat berupa formulir keluhan atau hotline khusus yang diawasi oleh pihak independen. Dengan demikian, korban tetap memiliki suara dalam proses tersebut.



5 Menyusun Prosedur untuk Pelaku

SOP juga harus mencakup prosedur yang jelas untuk menangani pelaku kekerasan. Langkah pertama adalah memastikan proses identifikasi pelaku dilakukan secara adil dan berdasarkan bukti. Jangan menghakimi sebelum investigasi selesai, dan pastikan pelaku diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi.

Jika terbukti bersalah, sediakan panduan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sanksi dapat berupa skorsing, pencabutan hak tertentu, atau bahkan pengeluaran dari kampus. Semua sanksi ini harus dijelaskan secara transparan dalam regulasi kampus untuk menghindari ketidakpastian.

Berikan kesempatan kepada pelaku untuk mendapatkan layanan rehabilitasi, seperti konseling atau pelatihan perubahan perilaku. Tujuannya adalah mencegah pelaku mengulangi perbuatannya di masa depan. Langkah ini menunjukkan bahwa kampus tidak hanya menghukum tetapi juga berupaya membangun kesadaran pelaku.

Pastikan seluruh prosedur ini terdokumentasi dengan baik dalam SOP, termasuk opsi banding jika pelaku merasa keputusan tidak adil. Dokumentasi ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi proses penanganan.



6 Menyusun Prosedur Monitoring dan Evaluasi

Langkah ini memastikan bahwa SOP diterapkan secara efektif dan terus diperbaiki. Tentukan indikator kinerja utama (KPI) untuk mengukur keberhasilan SOP, seperti jumlah kasus yang ditangani, tingkat kepuasan korban, dan jumlah kegiatan pencegahan yang dilakukan.

Rancang mekanisme pengumpulan data untuk memantau implementasi SOP. Data dapat dikumpulkan melalui laporan bulanan, survei kepuasan, atau audit internal. Data ini membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Adakan evaluasi rutin, misalnya setiap enam bulan atau setahun sekali, dengan melibatkan pemangku kepentingan utama. Evaluasi ini dapat berupa pertemuan untuk membahas keberhasilan, tantangan, dan rekomendasi perbaikan SOP.

Gunakan hasil evaluasi untuk merevisi SOP sesuai kebutuhan. Pastikan perubahan tersebut disosialisasikan kepada seluruh komunitas kampus agar semua pihak memahami pembaruan dalam prosedur.



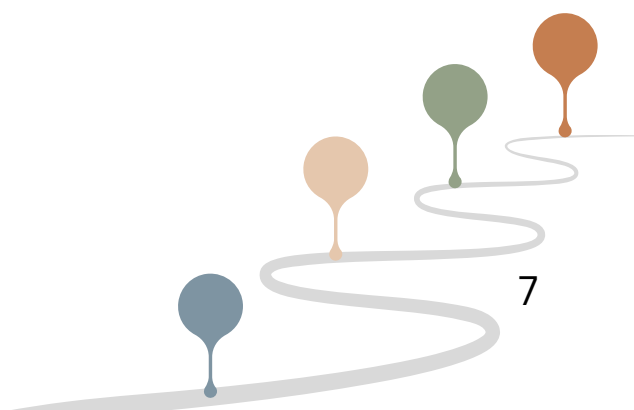
7 Melakukan Sosialisasi dan Pelatihan

Langkah terakhir adalah memastikan seluruh komunitas kampus memahami dan mampu menerapkan SOP. Adakan pelatihan rutin untuk pihak-pihak terkait, seperti dosen, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Fokuskan pelatihan pada isu praktis, seperti cara merespons laporan kekerasan dan menjaga kerahasiaan.

Sosialisasikan SOP melalui berbagai media, seperti brosur, poster, atau video. Pastikan materi ini menggunakan bahasa yang sederhana dan inklusif. Jika memungkinkan, sediakan versi digital yang mudah diakses.

Libatkan organisasi mahasiswa dan unit layanan konseling untuk membantu menyebarluaskan informasi tentang SOP. Pendekatan berbasis komunitas ini lebih efektif dalam menjangkau seluruh lapisan kampus.

Pastikan sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sekali. Perbarui materi sosialisasi sesuai dengan revisi SOP atau regulasi baru yang relevan. Dengan sosialisasi yang efektif, SOP dapat diterapkan dengan lebih baik, menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas kekerasan.



Ending violence requires all of us working together to build futures that are just and free of violence.

